

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor basis yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta serta kesesuaian kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat pertama nasional dengan nilai PDRB terbanyak selama lima tahun berturut-turut sekaligus merupakan kontributor terhadap PDB Nasional yang menempati urutan pertama dengan kontribusinya sebesar 17 persen terhadap perekonomian nasional. Suatu daerah dapat mengetahui sektor mana saja yang memiliki potensi atau keunggulan untuk dijadikan sektor basis melalui PDRB yang dimilikinya. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa PDRB Provinsi DKI Jakarta dan PDB Nasional. Untuk mengetahui sektor basis di Provinsi DKI Jakarta, metode analisis data menggunakan metode Location Quotient (LQ) yang terbagi menjadi Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) yang kemudian dilakukan analisis metode gabungan SLQ dan DLQ. Hasil analisis metode gabungan SLQ dan DLQ menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki sepuluh sektor unggulan, lima sektor andalan, dan dua sektor prospektif. Dalam mengoptimalkan sektor yang dimiliki, kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dan sejalan sektor basis yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut diperkuat dari pendapatan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang didominasi berasal dari sektor basis. Selain itu, data yang diperoleh dari BPS dan LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta digunakan sebagai data pendukung untuk membuktikan bahwa terdapat output yang dihasilkan dari masing-masing sektor.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Ekonomi Regional, Otonomi Daerah, Sektor Basis.

Abstract

This study aims to identify the basic sector owned by DKI Jakarta Province and the local government's suitability for implementing policies. DKI Jakarta Province has been ranked first nationally with the highest GRDP value for five consecutive years and is a contributor to the National GDP. It ranks first with its contribution of 17 percent to the national economy. A region can determine which sectors have the potential or advantages to be used as the base sector through its GRDP. The data collection method used the literature study method and secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) in the form of GRDP of DKI Jakarta Province and National GDP. To determine the base sector in DKI Jakarta Province, the data analysis method uses the Location Quotient (LQ) method. This method is divided into Static Location Quotient (SLQ) and Dynamic Location Quotient (DLQ), which is then analyzed using a combined SLQ and DLQ method. The analysis of the combined SLQ and DLQ methods shows that DKI Jakarta Province has ten leading sectors, five leading sectors, and two prospective sectors. In optimizing the sector owned, the policies implemented by the DKI Jakarta Provincial Government are appropriate and in line with the base sector held by the DKI Jakarta Province. Policy compliance is also strengthened by the regional tax revenues of DKI Jakarta Province in the form of provincial taxes and regional levies, which are dominated by the base sector. In addition, data obtained from the BPS and LKPJ of the Governor of DKI Jakarta Province are used as supporting data to prove that outputs are generated from each sector.

Keywords: Fiscal Decentralization, Regional Economy, Regional Autonomy, Base Sector.